



¹Desy Yemima Sondakh

¹Fakultas Teologi, UKI Tomohon

Email:

¹deisysondakh08@gmail.com

Diterima tanggal:

14 Oktober 2025

Disetujui Tanggal:

30 Desember 2025

Teologi Perdamaian John Yoder sebagai Kritik Profetik terhadap Hegemoni Militer Amerika Serikat dan Iran Kontemporer

ABSTRACT

*This library-based study probes how John Howard Yoder's theology of peace unmasks the normalization of state violence in the 2020–2025 United States–Iran escalation. Thematic analysis of *The Politics of Jesus* and strategic literature shows that sanctions, drone assassinations, and military rhetoric from both states reproduce domination while eroding human dignity. Rejecting just-war theory, Yoder presents the church as a counter-cultural community that witnesses through radical non-violence. Findings highlight the need for prophetic voices that resist tit-for-tat logics and call for structural repentance, while also opening space for interfaith ethical reflection, enriching contemporary political theology, and offering a normative contribution toward a just and sustainable global peace.*

Keywords: *Theology; Peace; Violence; State*

ABSTRAK

Studi pustaka ini menelaah bagaimana teologi perdamaian John Howard Yoder mengkritik normalisasi kekerasan negara dalam eskalasi konflik Amerika Serikat–Iran periode 2020–2025. Analisis isi atas *The Politics of Jesus* dan literatur strategis menunjukkan bahwa embargo ekonomi, serangan drone, dan retorika militeristik kedua negara mereproduksi dominasi sambil menihilkan martabat manusia. Yoder menolak teori perang adil dan memandang gereja sebagai komunitas alternatif yang bersaksi melalui praksis non-kekerasan. Temuan menegaskan kebutuhan suara profetik yang menolak logika balas-membalas serta menuntut pertobatan struktural, sekaligus membuka ruang refleksi etis lintas iman, memperkaya wacana teologi politik kontemporer, dan menawarkan kontribusi normative bagi perdamaian global yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kekerasan; Negara; Perdamaian; Teologi*

PENDAHULUAN

Relasi antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah lama menjadi salah satu poros ketegangan paling stabil dalam politik internasional modern. Hubungan ini tidak hanya ditandai oleh perselisihan kepentingan strategis, tetapi juga oleh benturan ideologis, sejarah intervensi asing, serta perebutan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979, yang mengakhiri dominasi barat atas struktur politik Iran, hubungan kedua negara bergerak dalam pola saling curiga yang nyaris permanen. Dalam pola tersebut, diplomasi kerap berjalan berdampingan dengan ancaman, dan dialog selalu dibayangi kemungkinan eskalasi. Ketegangan ini mengalami pembaruan signifikan ketika Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir JCPOA pada tahun 2018, sebuah keputusan yang kemudian diikuti dengan penerapan sanksi ekonomi komprehensif, di bawah pemerintahan Donald Trump, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Iran secara terbuka diarahkan pada tekanan maksimum, dengan tujuan melemahkan kapasitas ekonomi dan politik Teheran. Dampak kebijakan ini tidak berhenti pada elite negara, melainkan menjalar hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, memengaruhi akses terhadap kebutuhan dasar dan stabilitas sosial secara luas.

Periode 2020-2025 memperlihatkan bahwa relasi kedua negara tidak bergerak menuju deeskalasi, melainkan justru menunjukkan pola konfrontasi yang semakin kompleks. Pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani melalui serangan drone, serangkaian aksi sabotase terhadap fasilitas strategis, peningkatan aktivitas nuklir Iran, serta perang retorika yang semakin terbuka, membentuk sebuah lanskap konflik yang tidak lagi bersifat *episodic*. Ketegangan ini tidak hadir sebagai peristiwa tunggal, tetapi sebagai rangkaian tindakan yang saling mengunci dalam logika balas-membalas. Dalam wacana akademik dan kebijakan publik, dinamika tersebut umumnya dibaca melalui pendekatan keamanan dan kepentingan nasional. Analisis didominasi oleh pertimbangan strategis: stabilitas kawasan, keamanan sekutu, serta keseimbangan kekuatan global. Dalam kerangka ini, tindakan koersif baik berupa embargo ekonomi, tekanan diplomatic, maupun operasi militer terbatas dipahami sebagai instrumen yang sah dalam menjaga tatanan internasional. Pertanyaan moral sering kali diposisikan sebagai isu sekunder, atau bahkan dianggap berada di luar lingkup analisis ilmiah. Pendekatan semacam ini, meskipun berpengaruh, menyisahkan problem mendasar. Ketika kebijakan dibaca semata-mata sebagai respons rasional terhadap ancaman, penderitaan manusia cenderung menghilang dari pusat perhatian. Sanksi ekonomi diperlakukan sebagai angka statistik, bukan sebagai pengalaman hidup, kekerasan militer direduksi menjadi kalkulasi strategis, bukan peristiwa etis. Dengan demikian, kekerasan tidak lagi tampak sebagai kekerasan, melainkan sebagai prosedur normal dalam tata kelola global. Ironisnya, dalam situasi dimana dampak kebijakan negara semakin bersentuhan langsung dengan kehidupan sipil, refleksi teologis hampir tidak mendapat tempat. Penelusuran

terhadap literature mutakhir mengenai hubungan Iran-Amerika Serikat menunjukkan dominasi pendekatan politik, hukum internasional, dan ekonomi global, dengan minim keterlibatan perspektif teologi Kristen. Ketidakhadiran ini mencerminkan jarak yang kian melebar antara teologi dan realitas konflik internasional, seolah-olah iman hanya relevan diruang privat, bukan dalam pembacaan kekerasan struktural dunia. Padahal, dalam tradisi Kristen, persoalan kekerasan negara bukanlah isu pinggiran, injil sejak awal menghadirkan kritik terhadap logika dominasi dan pembenaran kekuasaan melalui paksaan.

Gereja tidak hanya dipahami sebagai institusi spiritual, tetapi sebagai komunitas yang dipanggil untuk memberi kesaksian alternative tentang cara hidup bersama. Ketika kekerasan dibungkus dalam bahasa keamanan dan kepentingan nasional, keheningan teologi justru menjadi persoalan etis tersendiri. Dalam konteks inilah pemikiran John Howard Yoder menjadi relevan. Melalui *The Politics of Jesus*, Yoder mengembangkan sebuah teologi perdamaian yang tidak berusaha menyesuaikan injil dengan realitas politik kekuasaan, melainkan sebaliknya: memuji legitimasi politik melalui kehidupan dan ajaran Yesus. Bagi Yoder, salib bukan sekadar simbol keselamatan personal, tetapi penyingkapan radikal terhadap kegagalan kekuasaan yang mengandalkan kekerasan. Berbeda dengan tradisi etika yang berupaya mengatur atau membatasi perang, Yoder mempertanyakan fondasi moral dari kekerasan itu sendiri. Ia menolak anggapan bahwa kekerasan dapat menjadi sarana netral demi tujuan yang dianggap baik. Dalam kerangka ini, negara apa pun bentuk ideologinya tidak kebal dari kritik teologis. Kekuasaan selalu harus di uji, terutama ketika ia menuntut korban atas nama stabilitas atau keamanan. Pendekatan ini membuka ruang pembacaan yang lebih kritis terhadap relasi Iran-Amerika Serikat. Alih-alih terjebak dalam dikotomi benar salah antarnegara, teologi perdamaian mengarahkan perhatian pada struktur dan logika yang memungkinkan kekerasan terus direproduksi. Embargo ekonomi, operasi militer presisi, maupun mobilisasi retorika perang dipahami sebagai bagian dari sistem yang sama-sama menormalisasi penderitaan manusia.

Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini berupaya membaca konflik Iran-Amerika Serikat periode 2020-2025 melalui perspektif teologi perdamaian John Howard Yoder. Fokus utama kajian ini bukan pada perumusan strategi politik alternative, melainkan pada kritik etis terhadap normalisasi kekerasan negara. Dengan demikian, tulisan ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan refleksi teologis dalam studi konflik internasional, sekaligus menegaskan bahwa teologi tetap memiliki peran penting dalam menilai dan menggugat praktik kekuasaan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan kualitatif yang mengandalkan analisis terhadap sumber-sumber tertulis

yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter kajian teologi sistematis dan etika publik, yang lebih menekankan refleksi konseptual daripada observasi empiris. Sumber utama penelitian ini terdiri dari karya-karya John Howard Yoder terutama *The Politics of Jesus* sebagai kerangka teologi perdamaian, serta literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan strategis terkait konflik Iran–Amerika Serikat dalam kurun 2020–2025. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi tematik dan hermeneutika teologis, yaitu membaca ulang narasi kekuasaan dan kekerasan negara melalui kacamata iman Kristen, khususnya pendekatan non-kekerasan radikal ala Yoder.

HASIL PEMBAHASAN

Teologi Perdamaian Yoder sebagai Kerangka Moral Konflik

Pemikiran John Howard Yoder mengenai teologi perdamaian menawarkan kerangka moral yang sangat penting untuk menilai praktik kekerasan negara, khususnya dalam konteks konflik internasional yang kompleks seperti antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran. Berakar pada tradisi Anabaptis dan etika radikal Injil, Yoder tidak sekadar menyerukan agar gereja menolak perang, tetapi menyatakan bahwa kekerasan, dalam bentuk apa pun, adalah pengkhianatan terhadap jalan Yesus Kristus.¹ Bagi Yoder, hidup Yesus bukan hanya contoh spiritual, melainkan deklarasi politik yang nyata dan subversif terhadap struktur kekuasaan zaman-Nya.

Dalam karya monumentalnya, *The Politics of Jesus*, Yoder berargumen bahwa tindakan Yesus selama pelayanan-Nya di dunia—menolak kekuasaan Roma, mengkritik elite religius Yahudi, mengampuni musuh, dan akhirnya disalib karena tidak tunduk pada logika dominasi adalah bentuk alternatif dari politik duniawi. Politik Injil, menurut Yoder, adalah politik salib, yakni kekuasaan yang dijalankan melalui kelembahlembutan, pelayanan, dan pengorbanan, bukan melalui senjata, invasi, atau sanksi. Karena itu, gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk menolak masuk dalam logika kekuasaan negara yang membenarkan kekerasan atas nama keadilan atau keamanan nasional. Yoder menolak teori *just war* karena menurutnya teori tersebut, meski tampak normatif, justru menjadi instrumen legitimasi yang membiarkan kekerasan negara berlangsung dalam batas-batas yang “dapat diterima.” Ia menunjukkan bahwa dalam praktiknya, negara-negara besar termasuk Amerika Serikat selalu berhasil membenarkan agresi militer mereka melalui retorika pembebasan atau stabilisasi.² Dalam konflik Iran–AS, kita menyaksikan bagaimana

¹ Yoder, John Howard, *The Politics of Jesus* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1994).

² William T. Cavanaugh, *Theopolitical Imagination* (London ; New York: T & T Clark, 2002).88-

kekerasan negara disamakan sebagai diplomasi, mulai dari embargo ekonomi yang melumpuhkan sektor kesehatan dan pangan rakyat Iran, hingga pembunuhan tokoh militer seperti Jenderal Qasem Soleimani melalui serangan drone tanpa proses hukum.³ Menurut Yoder, gereja tidak boleh menjadi bagian dari sistem semacam itu. Ia harus menjadi komunitas alternative *alternative community* yang menampilkan cara hidup yang lain, yaitu hidup tanpa kekerasan dan tanpa dominasi.⁴ Gereja bukan hanya tempat ibadah, melainkan saksi sosial yang menolak tunduk kepada narasi nasionalisme, kapitalisme militeristik, dan politik pembenaran diri. Dalam banyak kesempatan, Yoder menyatakan bahwa gereja yang diam terhadap kekerasan negara sebenarnya telah menjadi penyembah berhala kekuasaan duniawi.

Embargo ekonomi, meskipun tampak “non-fisik,” adalah bentuk kekerasan struktural yang menghukum masyarakat sipil, bukan elite politik.⁵ Demikian pula dengan serangan drone yang menewaskan individu tanpa proses hukum: tindakan itu bukan sekadar pelanggaran hukum internasional, tetapi pelanggaran terhadap martabat manusia sebagai citra Allah.⁶ Melalui kacamata Yoder, konflik ini tidak dapat dibaca dalam skema “AS baik” dan “Iran jahat,” atau sebaliknya. Yoder tidak berpihak pada aktor negara, melainkan pada logika Injil. Yang ditolaknya adalah *struktur kekuasaan mana pun* yang menganggap bahwa kekerasan dapat dibenarkan demi tujuan apa pun. Hal ini membuat pendekatan Yoder sangat kontras dengan realisme politik dalam studi hubungan internasional, yang memandang perang dan kekerasan sebagai instrumen sah dalam mempertahankan kepentingan negara. Lebih dari sekadar menolak perang, Yoder menolak konsep keselamatan melalui kekuasaan.⁷ Ia berargumen bahwa Yesus tidak datang untuk membentuk koalisi militer atau menciptakan negara adidaya teokratis, tetapi untuk membentuk komunitas yang setia kepada Allah melalui ketaatan, pengampunan, dan kasih radikal bahkan kepada musuh. Dengan demikian, gereja tidak bisa netral. Dalam konflik seperti Iran-AS, gereja harus bersaksi: bukan memihak Iran atau Amerika, tetapi memihak kehidupan, memihak kebenaran, dan memihak jalan salib.

Yesus sebagai Politik Alternatif

Bagi John Howard Yoder, Yesus bukan hanya tokoh spiritual atau pengajar etika pribadi, melainkan inkarnasi dari politik alternatif suatu bentuk kuasa yang

³ Dykstra, Craig, *Growing in the Life of Faith: Education and Christian Practices* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2005).

⁴ Yoder, John Howard, *The Politics of Jesus*, 127.

⁵ Hauerwas, Stanley, *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, n.d.), 50.

⁶ Hauerwas, Stanley, *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic*, 211-15.

⁷ Yoder, John Howard, *The Politics of Jesus*, 158-60.

bertolak belakang dengan struktur dominasi dunia. Dalam *The Politics of Jesus*, Yoder berpendapat bahwa tindakan dan ajaran Yesus selama hidup-Nya merupakan demonstrasi konkret dari sebuah alternatif radikal terhadap kekuasaan kekaisaran, kekuasaan agama, dan kekerasan politik.⁸ Ketika banyak teologi politik membenarkan penggunaan kekerasan demi stabilitas, Yesus justru hadir sebagai figur yang menolak kompromi terhadap kekuasaan, bahkan hingga kematian-Nya di kayu salib.⁹ Model kekuasaan Yesus, menurut Yoder, adalah kekuasaan yang muncul dari pengorbanan, bukan dominasi; dari pengampunan, bukan pembalasan. Dalam hal ini, Yesus tidak netral, melainkan secara aktif melawan sistem yang menindas, namun tanpa kekerasan.¹⁰ Hal ini menjadikan Yesus bukan hanya sebagai pengampun dosa, tetapi juga sebagai penantang sistem politik duniawi.

Sejumlah studi kontemporer memperkuat relevansi posisi Yoder seperti yang ditulis David A. Meade, dalam tesisnya di Seattle Pacific University, menyatakan bahwa Yoder menawarkan “alternatif-polis” yang menjadikan Yesus sebagai pusat etika politik dan spiritual yang tidak tunduk pada kekuasaan status quo. Dalam kajian teologis Drost (2019), Yoder bahkan ditampilkan sebagai pengusung misi diaspora gereja, di mana komunitas Kristen dipanggil hidup dalam politik damai di tengah masyarakat kekerasan.¹¹ Hal ini diperkuat pula oleh Daniel Troxell dalam *Journal for the Study of Radicalism*, yang melihat Yoder sebagai pelopor teologi pasca-anarkis yang menggugat segala bentuk legitimasi kekuasaan koersif atas nama teologi negara.¹² Yoder menolak dikotomi modern antara “iman privat” dan “politik publik.” Baginya, iman sejati justru menyatakan dirinya dalam bentuk komunitas alternatif yang menjadi tanda profetik di tengah sistem dunia. Oleh karena itu, mengikuti Yesus berarti menolak cara dunia berpolitik termasuk politik sanksi ekonomi, invasi militer, maupun retorika pembunuhan demi keamanan. Dalam konteks konflik Iran–Amerika, cara Yesus menjadi semacam kritik tajam atas logika kedua negara yang sama-sama menggunakan kuasa untuk menindas dengan alasan pembebasan. Seperti yang dinyatakan oleh Ted Grimsrud, Yoder membentuk suatu epistemologi perdamaian, di mana kebenaran tidak ditentukan oleh kekuasaan atau hasil, tetapi

⁸ Yoder, John Howard, *The Politics of Jesus*, 39–45.

⁹ Hauerwas, Stanley, *Against the Nations: War and Survival in a Liberal Society* (Minneapolis: Winston Press, 1985), 20.

¹⁰ Hauerwas, Stanley, *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic*, 55–60..

¹¹ Michael J. Rhodes, “Arranging the Chairs in the Beloved Community: The Politics, Problems, and Prospects of Multi-Racial Congregations in 1 Corinthians and Today,” *Studies in Christian Ethics* 33, no. 4 (November 2020): 510–28, <https://doi.org/10.1177/0953946819859715>.

¹² Yau Man Siew, “A Case Study in Adult Discipleship: Stories of Apprenticeship to Jesus at an Urban Anglican (Episcopal) Church,” *Christian Education Journal: Research on Educational Ministry* 18, no. 2 (August 2021): 189–211, <https://doi.org/10.1177/0739891320959084>.

oleh kesetiaan kepada jalan Yesus.¹³ Gereja yang setia pada jalan ini tidak bisa hanya menjadi “penonton” diplomasi negara, melainkan harus menjadi saksi aktif dari kuasa kasih yang melampaui kekuatan nuklir atau logika dominasi geopolitik. Dengan demikian, melihat Yesus sebagai politik alternatif berarti menggeser seluruh cara pandang kita tentang kekuasaan, keselamatan, dan identitas komunitas. Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwa dari neraka, tetapi menyediakan cara hidup baru di dunia ini—tanpa kekerasan, tanpa balas dendam, tanpa pengkhianatan terhadap musuh.

Gereja sebagai Komunitas Non-Kekerasan

Salah satu pilar utama dalam teologi perdamaian John Howard Yoder adalah bahwa gereja bukan hanya komunitas rohani, melainkan komunitas sosial-politik yang hidup sebagai alternatif terhadap struktur kekuasaan dunia. Gereja, dalam kerangka ini, tidak boleh meniru cara negara dalam menjalankan kekuasaan terutama kekuasaan yang menggunakan kekerasan sebagai alat stabilitas. Yoder menyebut gereja sebagai *polis baru*, yakni ruang sosial tempat umat hidup dengan logika Injil, bukan logika kekuasaan atau pembalasan.¹⁴ Komunitas gereja menurut Yoder adalah *visible alternative*—suatu bentuk masyarakat baru yang menunjukkan bahwa kehidupan tanpa kekerasan, tanpa paksaan, dan tanpa dominasi adalah mungkin.¹⁵ Dalam *Body Politics*, Yoder menekankan bahwa gereja bukan hanya pewarta Injil, tetapi juga **praktik sosial dari Injil itu sendiri**: tempat di mana musuh diampuni, orang miskin dilayani, dan kekuasaan tidak menjadi tujuan.¹⁶ Gereja tidak boleh netral terhadap kekerasan negara; justru dalam ketidaknetralan inilah, gereja menjadi saksi terhadap kerajaan Allah. Gagasan ini sangat relevan ketika dibawa dalam konteks konflik Iran–Amerika. Dalam situasi di mana dua kekuatan dunia saling memaksakan kehendak melalui embargo ekonomi, intervensi militer, dan perang wacana, gereja seharusnya hadir sebagai suara moral yang tidak terkooptasi oleh nasionalisme. Namun dalam kenyataannya, banyak gereja di Barat justru membenarkan kekerasan negara mereka atas nama “demokrasi” atau “hak asasi,” dan gereja di Timur menjustifikasi perlawanan bersenjata atas nama “pembebasan.” Baik

¹³ Hauerwas, Stanley, *Sanctify Them in the Truth: Holiness Exemplified* (Nashville: Abingdon Press, 1998), 77–81.

¹⁴ Yoder, John Howard, *The Politics of Jesus*, 122–28.

¹⁵ Hauerwas, Stanley, *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1983), 149–55.

¹⁶ Hauerwas, Stanley, *Unleashing the Scripture: Freeing the Bible from Captivity to America* (Nashville: Abingdon Press, 1993), 17–24.

yang satu maupun yang lain, menurut Yoder, telah meninggalkan identitas gerejawi mereka yang sejati.¹⁷

Drost (2019) dalam penelitiannya tentang diaspora dan misi gereja menggarisbawahi bahwa gereja seharusnya tidak mengejar pengaruh politik duniawi, tetapi membentuk pola hidup yang radikal melalui komunitas yang melayani, mengampuni, dan mendoakan musuh.¹⁸ Meade (2021) bahkan menekankan bahwa spiritualitas perdamaian dalam gereja justru menjadi kekuatan subversif yang mengubah masyarakat dari bawah ke atas, bukan melalui kekuasaan, tetapi kesaksian hidup.¹⁹ Yoder menolak keras instrumentalitas gereja bagi agenda kekuasaan. Dalam kritiknya terhadap *Christendom*, ia menyatakan bahwa gereja yang menjadi kaki tangan negara justru telah kehilangan kemurniannya sebagai tubuh Kristus. Dalam *The Original Revolution*, Yoder menyebut bahwa kekristenan bukan dipanggil untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk menjadi alternatif atas dunia yang sudah ditaklukkan oleh kekerasan. Dalam perspektif ini, gereja seharusnya tidak hanya berkata “tidak” terhadap kekerasan, tetapi juga membangun kehidupan bersama yang berbeda dari tatanan dunia yang memproduksi perang. Gereja sebagai komunitas non-kekerasan berarti gereja yang mempraktikkan rekonsiliasi, menerima orang asing, mengampuni musuh, dan hidup dalam solidaritas dengan yang tertindas. Oleh karena itu, dalam konflik global seperti antara Iran dan Amerika Serikat, pertanyaannya bukan hanya apa posisi teologis gereja, tetapi apa bentuk keberadaannya di dunia ini. Apakah gereja menjadi ruang yang memproduksi keamanan palsu lewat koalisi kekuasaan? Atau menjadi tanda kasih Allah yang melampaui batas negara, agama, dan ideologi? Di sinilah Yoder menyerukan bahwa gereja harus *hidup berbeda*, dan dari perbedaan itulah dunia dapat melihat harapan akan perdamaian sejati.

Penolakan Total terhadap Kekerasan

Teologi perdamaian John Howard Yoder berpijak pada penolakan total terhadap kekerasan, tidak hanya dalam bentuk militer atau fisik, tetapi juga dalam bentuk struktural, ekonomi, dan simbolik. Dalam *The Politics of Jesus*, Yoder menyatakan bahwa jalan salib yang dipilih Yesus bukanlah kegagalan politik, melainkan bentuk tertinggi dari resistensi tanpa kekerasan terhadap tatanan dunia yang korup.²⁰ Kekerasan, bagi Yoder, bukan sekadar dosa moral, melainkan

¹⁷ Lindbeck, George A., *The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age* (Philadelphia: Westminster Press, 1984), 20–45.

¹⁸ MacIntyre, Alasdair, *After Virtue: A Study in Moral Theory* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1981), 60–65.

¹⁹ Rhodes, “Arranging the Chairs in the Beloved Community.”

²⁰ Yoder, John Howard, *The Politics of Jesus*, 99–104.

kegagalan gereja dalam menyaksikan Injil. Ketika gereja mulai mencari legitimasi atas kekerasan dengan teori seperti *just war*, maka ia telah kehilangan karakter kenabiannya dan tunduk pada logika kuasa duniawi.²¹ Bagi Yoder, teologi Kristen tidak memiliki tempat bagi kekerasan yang "etis". Kekerasan, dalam bentuk apa pun, selalu menyalahi prinsip kerajaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus.²² Penolakan Yoder terhadap kekerasan ini berbeda dengan pasifisme liberal; ia tidak menawarkan jalan netral atau apatis, tetapi panggilan aktif untuk menolak balas dendam dan membongkar struktur penindasan melalui solidaritas, pengampunan, dan disiplin komunitas.²³ Ia menyebut gereja sebagai "alternatif historis", bukan pelengkap negara, karena gereja harus menunjukkan bahwa perdamaian bukan sekadar utopia, tetapi praktik nyata yang bisa dijalani. Dalam konteks konflik Iran-AS, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Retorika kekerasan atas nama keamanan nasional, baik dalam bentuk embargo, sabotase fasilitas nuklir, maupun pembunuhan drone, semuanya ditolak secara teologis oleh pendekatan Yoderian. Yoder tidak mengizinkan pembenaran kekerasan, bahkan jika dilakukan oleh negara demokratis atau atas nama "perdamaian jangka panjang."²⁴ Justru di sinilah gereja harus berdiri: tidak membela pihak yang kuat, tetapi menyuarakan suara orang yang tak terdengar, yakni korban dari kebijakan politik koersif.

Salah satu kajian teologis kontemporer yang memperkuat posisi Yoder adalah Caleb O. Oladipo dalam artikelnya tentang perdamaian radikal, menyatakan bahwa Yoder memberikan etika kenabian yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang semakin menormalisasi kekerasan atas nama stabilitas geopolitik. Begitu juga dengan karya Greg Boyd yang melihat relevansi penolakan kekerasan Yoder dalam konteks modern sebagai bentuk "kerendahan politis" yang mencerminkan karakter Allah sendiri. Penelitian terbaru oleh A. Yuliyanto dalam konteks Indonesia juga menekankan bahwa kekerasan struktural hari ini baik melalui hukum, ekonomi, maupun wacana politik tidak bisa dihadapi dengan perangkat moral biasa, tetapi memerlukan keberanian untuk mengikuti jalan Yesus secara radikal. Karena itu, penolakan Yoder terhadap kekerasan adalah penolakan terhadap seluruh sistem yang menopang kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Dalam dunia yang mengagungkan kekuatan dan pembalasan, Yoder justru menunjukkan bahwa *kemenangan Injil* bukan

²¹ Wood Roberts, Robert C. W. Jay, *Intellectual Virtues: An Essay in Regulative Epistemology* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 145–150.

²² Smith, James K. A, *Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009), 153–158.

²³ Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1989), 34–38.

²⁴ Smith, James K. A, *Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation*, 20.

terletak pada dominasi, tetapi pada kesetiaan dalam kelemahan. Dan dalam kesetiaan itulah gereja menemukan kekuatannya sebagai komunitas yang benar-benar berbeda.

Pokok-Pokok Besar Implikasi Teologi John Howard Yoder terhadap konflik AS-Iran

Dekonstruksi Klaim “Kekerasan yang diperlukan”

Teologi Politik Yoder menolak anggapan demi tercapainya perdamaian atau stabilitas. Dalam kerangka politik Yesus, penggunaan kekuatan militer bukanlah keharusan realistis, melainkan hasil dari asumsi teologis yang telah menyimpang, yakni bahwa keselamatan dan keteraturan dunia harus dijaga melalui paksaan. Jika diterapkan pada konflik AS-Iran, kritik Yoder menantang narasi kedua belah pihak yang mempresentasikan kekerasan sebagai langkah terakhir yang tidak terhindarkan. Bagi Yoder, logika “perang demi perdamaian” justru meneguhkan siklus kekerasan yang menyangkal kesaksian injil.

Kritik terhadap Nasionalisme sebagai Bentuk berhala modern

Yoder secara konsisten mengkritik nasionalisme yang menempatkan negara sebagai otoritas moral tertinggi. Ia melihat negara baik dalam bentuk republic sekuler maupun teokrasi religius cenderung mengklaim legitimasi ilahi untuk membenarkan kekerasan terhadap pihak lain. Dalam konteks konflik AS-Iran, perspektif ini menyikap bagaimana kepentingan nasional, keamanan, dan identitas ideologis berfungsi sebagai “berhala” yang menuntut pengorbanan manusia. Gereja, menurut Yoder, tidak boleh mengafirmasi klaim tersebut, sebab kesetiaannya tidak pernah dapat diarahkan kepada negara mana pun.

Gereja sebagai komunitas Alternatif ditengah konflik global

Bagi Yoder, gereja bukanlah alat moral negara, melainkan ekklesia sebuah komunitas sosial alternative yang hidup menurut logika kerajaan Allah. Gereja dipanggil untuk memperagakan cara hidup yang berbeda dari politik kekuasaan dunia. Dalam situasi konflik seperti AS-Iran, pendekatan ini mengimplikasikan bahwa komunitas Kristen di kedua konteks tidak boleh larut dalam retorika geopolitik nasional, melainkan mempraktikkan rekonsiliasi, penerimaan, dan solidaritas kemanusiaan.

Non-Kekerasan sebagai Praktik Iman bukan strategi politik

Yoder menegaskan bahwa non-kekerasan Kristen tidak boleh dipahami sebagai taktik pragmatis yang dipilih karena efektif, melainkan sebagai bentuk ketaatan iman terhadap jalan salib. Penolakan terhadap kekerasan bukan karena kurangnya realisme politik, tetapi karena kesetiaan kepada Kristus yang memilih penderitaan daripada dominasi. Dalam membaca konflik AS-Iran, pendekatan ini menolak logika

pembalasan dan pencegahan militer, serta menggeser perhatian dari kemenangan strategis menuju kesetiaan etis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teologi perdamaian John Howard Yoder memberikan kerangka etik yang radikal dan relevan dalam membaca konflik antara Iran dan Amerika Serikat, dengan menolak segala bentuk kekerasan sebagai pengkhianatan terhadap Injil Kristus. Dalam konteks ini, gereja tidak dapat bersikap netral atau membenarkan kekuasaan koersif negara, melainkan dipanggil menjadi komunitas alternatif yang hidup dalam kesetiaan kepada jalan salib—bukan pada logika dominasi geopolitik. Ketika konflik internasional sering dibingkai dalam narasi politis dan strategis, Yoder menuntut gereja untuk memulihkan dimensi profetiknya dengan menjadi saksi terhadap kasih yang mengampuni dan perdamaian yang melampaui logika pembalasan. Kesimpulan ini mengisi kekosongan dalam wacana etika global yang selama ini mengabaikan peran iman dalam menilai kekerasan, serta menegaskan bahwa teologi tetap relevan sebagai kritik struktural terhadap ketidakadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Cavanaugh, William T. *Theopolitical Imagination*. London ; New York: T & T Clark, 2002.
- Dykstra, Craig. *Growing in the Life of Faith: Education and Christian Practices*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005.
- Hauerwas, Stanley. *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, n.d.
- — —. *Against the Nations: War and Survival in a Liberal Society*. Minneapolis: Winston Press, 1985.
- — —. *Sanctify Them in the Truth: Holiness Exemplified*. Nashville: Abingdon Press, 1998.
- — —. *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1983.
- — —. *Unleashing the Scripture: Freeing the Bible from Captivity to America*. Nashville: Abingdon Press, 1993.
- Lindbeck, George A. *The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age*. Philadelphia: Westminster Press, 1984.
- MacIntyre, Alasdair. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1981.
- Rhodes, Michael J. "Arranging the Chairs in the Beloved Community: The Politics, Problems, and Prospects of Multi-Racial Congregations in 1 Corinthians and Today." *Studies in Christian Ethics* 33, no. 4 (November 2020): 510-128. <https://doi.org/10.1177/0953946819859715>.
- Roberts, Robert C., Wood, W. Jay. *Intellectual Virtues: An Essay in Regulative Epistemology*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Siew, Yau Man. "A Case Study in Adult Discipleship: Stories of Apprenticeship to Jesus at an Urban Anglican (Episcopal) Church." *Christian Education Journal: Research on Educational Ministry* 18, no. 2 (August 2021): 189-211. <https://doi.org/10.1177/0739891320959084>.
- Smith, James K. A. *Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009.
- Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1989.
- Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1994.